

# URGENSI BIDANG KEWARTAWANAN BAGI JURUSAN KPI

Oleh Hamdan Daulay

## A. Pendahuluan

Ketua PWI Pusat Tarman Azzam dalam kuliah umum yang diadakan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga tgl 6 April 2006 menjelaskan, begitu luas prospek kerja bagi alumni KPI. Hal ini dilihat dari kurikulum KPI yang banyak terkait dengan bidang pers, sehingga diharapkan mampu melahirkan tenaga profesional dalam bidang kewartawanan. Sementara data di lapangan menunjukkan begitu banyak media massa di tengah masyarakat, baik media cetak maupun elektronik. Media massa tersebut tentu membutuhkan puluhan ribu tenaga wartawan profesional agar tumbuh pers yang berkualitas di tengah masyarakat. Persoalannya sekarang, mampukah alumni KPI bersaing dalam mengisi peluang kerja dalam bidang kewartawanan yang begitu luas?

Sementara di sisi lain fenomena yang muncul dewasa ini menunjukkan semakin banyak civitas akademika KPI Fakultas Dakwah di lingkungan Perguruan

Tinggi Islam, yang fesimis dengan prospek kerjanya. Akibatnya, dari waktu ke waktu minat mahasiswa untuk memilih jurusan KPI semakin menurun secara drastis. Ditambah lagi dengan munculnya prodi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Sosial Humaniora (dalam kasus UIN Sunan Kalijaga) membuat jurusan KPI Fak. Dakwah semakin termarginalkan. Ke depan semakin berat tantangan yang dihadapi KPI untuk mendapatkan mahasiswa.

Berbeda dengan fakultas Tarbiyah dan Syaria'ah yang dinilai oleh mahasiswa masih memiliki prospek kerja cukup luas. Sebab alumni dari fakultas ini memiliki prospek kerja dalam bidang guru dan bidang hukum. Itulah sebabnya calon mahasiswa lebih banyak memilih fak Tarbiyah dan Syaria'ah. Sebab tidak bisa dipungkiri, pertimbangan praktis untuk prospek kerja ke depan menjadi salah satu alasan bagi mahasiswa dalam memilih jurusan di perguruan tinggi.

Terkait dengan kurikulum yang ada di jurusan KPI dan profesi apa yang lebih tepat mereka tekuni sering menjadi pertanyaan. Apalagi saat ini

dengan adanya perubahan IAIN menjadi UIN dan diiringi dengan munculnya fakultas baru dan jurusan baru, seperti prodi Ilmu Komunikasi, membuat jurusan KPI semakin terancam. Fenomena “pengkerdilan” jurusan KPI sudah mulai tampak di beberapa kampus yang ada prodi Ilmu Komunikasi, dengan menurunnya perolehan mahasiswa baru secara drastis.

### **B. Keahlian**

Sesungguhnya bicara tentang profesi bagi civitas akademika KPI tidak perlu dikhawatirkan manakala kurikulum yang ada dikelola dengan baik, dan diisi oleh dosen yang berkualitas. Ukuran dosen yang berkualitas ini tentu tidak hanya sekedar mampu mengajar, namun perlu juga diperhatikan relevansi keahlian yang dimiliki dengan mata kuliah yang diajarkan. Dengan demikian proses perkuliahan semakin berkualitas manakala seorang dosen mengajarkan mata kuliah yang sesuai dengan keahlian (bidang pendidikannya).

Secara garis besar ada tiga keahlian yang bisa dimiliki mahasiswa KPI dari kurikulum yang ada, yaitu sebagai jurnalis (wartawan), penyiar dan orator. Ketiga bidang tersebut bisa dimiliki oleh mahasiswa KPI manakala kurikulum yang ada ditekuni dan dikelola dengan baik. Artinya, di jurusan KPI dibutuhkan banyak dosen yang memiliki keahlian dalam bidang

media sesuai dengan muatan kurikulum yang ditawarkan selama ini.

Dalam tulisan ini pembicaraan akan difokuskan pada profesi kewartawanan (jurnalis). Hal ini seiring dengan kayanya mata kuliah bidang kewartawanan yang ada di jurusan KPI. Mata kuliah tersebut diantaranya, jurnalistik, publisistik, reporting, penulisan naskah, penulisan artikel, manajemen pers, periklanan dan lain-lain. Mata kuliah tersebut jelas sangat membantu bagi mahasiswa yang berminat menekuni bidang kewartawanan. Profesi ini jelas tergolong sangat menarik, karena dewasa ini begitu banyak terbuka lapangan kerja kewartawanan seiring dengan banyaknya media massa baik cetak maupun elektronik di tengah masyarakat.

Dibanding dengan profesi lainnya, wartawan termasuk kerja profesi paling muda dalam peradaban manusia. Karena itu wajar jika kerja profesi ini sering lepas dari pengenalan. Sifat keprofesionalan suatu pekerjaan ditandai dengan standar teknik dan etika kerja. Keduanya berjalan seiring dan standar untuk kerja ini bukan bagi kepentingan pelaku profesi ataupun institusinya yang menjadi wahananya, tetapi justru pada harapan (expectation) dari masyarakat lingkungannya. Dalam menegakkan standard ekspektasi inilah kehadiran profesi tersebut memiliki makna (signifikan) dalam kaitannya

dengan kehidupan masyarakat (Edward Depari, 1998: 73).

Pada akhirnya signifikansi inilah yang akan melahirkan martabat profesi dari profesi yang bersangkutan. Standard teknik dan etika adakalanya tak dirunuskan secara verbal. Justru ia muncul melalui praktek sehari-hari dan sudah menjadi tradisi. Untuk sejumlah profesi, kedua macam standar ini dikembangkan secara terencana dan khusus. Ambil contoh profesi kedokteran, notariat, pengacara, guru dan lain sebagainya. Sedangkan standar teknik dengan profesi kependidikan atau latihan yang ketat dalam profesi yang bersangkutan. Standar inilah yang kemudian menjadi titik tolak dalam memposisikan profesi.

### **C. Profesi Wartawan**

Harus diakui dalam perkembangan era informasi, maka rekrutmen menjadi seorang wartawan disatu sisi ada yang lebih ketat, namun disisi lain ada yang asal-asalan. Untuk yang terakhir ini, dikaitkan dengan tujuan utama media massa dalam mencari untung, sehingga mengabaikan azas signifikansi dan ekspektasinya. Mereka dengan seandainya mengangkat seseorang dipekerjakan menjadi wartawan tanpa melihat standar kompetensi.

Keadaan akan menjadi semakin buruk jika media yang baru tersebut tidak dikelola dengan baik,

sehingga bisa menimbulkan masalah baru. Diantaranya tindakan yang melacurkan profesi kewartawanan, mengabaikan hukum dan etika serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Akibatnya kemudian, selain banyak pujian terhadap kinerja pers dalam pemberitaan yang bebas, namun banyak juga yang melakukan tuduhan bahwa pers telah kebablasan dalam mempraktekkan paradigma kemerdekaan pers yang profesional. Artinya, pers telah tercerabut dari nilai etika, sehingga pers sering diibaratkan seperti kuda yang lepas dari kandang. Pers menghadapi kondisi yang sangat dilematis, antara tuntutan etika pers dengan kebebasan pers. Inilah salah satu problema besar dalam pers Indonesia saat ini. Secara universal, sebenarnya standar kompetensi kewartawanan dari seseorang bukan hanya pada ukuran di institusi media, namun pemred yang mengangkatnya harus sudah memenuhi standar kompetensinya (Jacob Oetama, 1984: 84).

Wartawan harus tunduk pada ketentuan hukum, menaati kode etik profesi dan menghormati segala aturan organisasi profesi, jika ia ikut dalam sebuah organisasi. Wartawan juga terkait pada segala hak dan kewajibannya baik di media tempat bekerja atau dalam organisasi profesinya. Wartawan nantinya juga akan memperoleh bimbingan advokasi dan media massa tempatnya bekerja,

didukung organisasi profesinya. Karena biasanya masing-masing instansi atau organisasi profesi memberlakukan sistem tes/seleksi.

Profesi sebenarnya memiliki identitas khusus. Profesi bukan sekedar ahli dan pandai atau cakap dalam bidang pekerjaan, namun juga punya standar universal, termasuk wadah, aturan dan cendekia serta kemanfaatan positif. Seseorang cakap dalam bidangnya yang biasa disebut sebagai profesional. Tentu hal tersebut merupakan kemampuannya atas pekerjaan tetapi bukan merupakan profesi secara keseluruhan (Gunawan Mohammad, 1996: 42).

#### **D. Kebebasan Pers**

Banyak literatur yang telah membahas tentang kebebasan pers. Misalnya pasal 19 Deklarasi HAM dan pasal 19 konvensi hak-hak politik sipil yang secara tegas menyatakan, bahwa kebebasan pers adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang paling generik, yakni hak untuk tahu dan hak berpendapat bagi warga masyarakat. Sementara pers adalah institusi yang menjalankan peran mengorganisasikan dan menyebarkan informasi ke ruang publik dalam rangka memenuhi hak asasi manusia yang paling generik itu. Dengan kata lain, pers adalah institusi yang mendapatkan mandat menjalankan peran mendidik masyarakat. Artinya, yang mendapatkan hak kebebasan karena

membawa kepercayaan dan harapan dari masyarakat.

Karena perannya yang demikian, ia membutuhkan kebebasan untuk sanggup mengemas informasi dan menyebarkannya ke ruang publik dengan baik. Dengan demikian, kebebasan pers sesungguhnya merupakan prasyarat bagi terwujudnya kebebasan masyarakat untuk secara leluasa dapat menerima dan menyampaikan informasi. Tanpa kebebasan pers, daya nalar, sistem kognisi, dan ekspresi warga masyarakat kelak menjadi kacau. Dengan demikian peradaban dan kebudayaan masyarakat yang terbentuk pun kelak bisa menjadi runyam (Susan M Strohm, 1999: 66).

Itu sebabnya kebebasan pers hakikatnya adalah sebuah "struktur objektif" atau blueprint bagi warga masyarakat (politik dan budaya) yang berkeinginan mendambakan ketersediaan informasi bebas di ruang publik. Ia semacam acuan bagi terbentuknya komunitas yang terbuka dan kaya informasi. Karena itu salah besar jika muncul anggapan kebebasan pers sekedar menjadi hak profesional wartawan untuk menyampaikan informasi. Kebebasan pers bukanlah milik wartawan saja. Bukan pula milik pekerja pers, apalagi kaum pemilik modal pers. Namun ia milik kita semua yang terkait dengan upaya memenuhi kepentingan kita sebagai warga

masyarakat politik dan budaya (JVS Tondowijoyo, 1991:57).

Perlu diakui, pers sering mengalami gangguan atas kebebasannya dalam menjalankan peran memenuhi hak-hak publik. Ancaman itu bisa datang dari dua sisi, intramedia dan ekstramedia. Ancaman intramedia bisa datang karena gangguan profesionalisme wartawan dan alih fungsi pers oleh pemilik modal ke tujuan-tujuan ekonomi politik yang tidak relevan dengannya. Terutama menjelang Pemilu, pers pada umumnya rentan terpenetrasi oleh sejumlah kepentingan insan pers yang langsung atau tidak langsung terkait dengan proses politik dalam kampanye dan pemilu.

Ancaman ekstramedia bisa datang dari institusi politik, birokrasi, TNI-Polri, komunalisme, dan lain-lain yang secara sistematis melakukan pendisiplinan terhadap ritme kerja. Karena itu, publik harus peka dan cermat dalam mengawasi setiap ancaman terhadap kebebasan pers. Siapa pun boleh menggunakan pers dalam rangka menyampaikan sekaligus mendapatkan informasi yang bebas. Juga bagi siapa pun memanfaatkan pers untuk membentuk opini dalam kerangka mewujudkan eksistensi diri dan kelompoknya. Namun jika hal itu bukan dimaksudkan dalam kerangka memenuhi kepentingan publik, itu

berarti sudah keluar dari konteks kebebasan pers itu, sendiri.

Namun jika ada wartawan melalui proses kerja dengan standar jurnalistik yang tinggi menulis fakta, misalnya terkait dengan tindakan tak terpuji kontestan Pemilu, tidaklah ada alasan bagi masyarakat untuk tidak turut membelanya.

Dalam hal semacam itu, pembaca berkewajiban pula memaksa mereka yang terkait dengan tindakan yang tak terpuji itu untuk mengambil burden proof-nya dan membuktikan bahwa wartawan yang membongkar kasus semacam itu tidak melakukan kesalahan. Namun, wartawan bukanlah profesi yang tak terjamah oleh tangan hukum. Sebagai warga masyarakat biasa, mereka sama posisinya dengan warga negara lain di mata hukum. Apabila ketahuan wartawan melakukan tindak pidana memeras, menipu, bahkan membunuh, maka wartawan pun harus diberi sanksi yang berat.

Namun jika yang dipersoalkan adalah karya jurnalistiknya, saat itulah aparat hukum dituntut mampu bertindak ekstracermat dan hati-hati dalam menangani kasusnya. Sebab, untuk memahami kasus semacam itu dibutuhkan pemahaman jurnalisme yang tidak sederhana. Mereka bisa dipersalahkan jika dalam karya jurnalistiknya terkandung niat buruk yang terselubung (*actual malice*) tanpa tujuan membela kepentingan publik.

Kepentingan publik itu misalnya membongkar penyalahgunaan wewenang yang melibatkan elite politik (Ashadi Siregar, 1998: 54).

#### **E. Pengembangan KPI**

Realita yang ada selama ini menunjukkan, walaupun jurusan KPI memiliki kurikulum yang banyak terkait dengan bidang kewartawanan, namun belum mampu melahirkan banyak wartawan profesional. Padahal kebutuhan pada wartawan profesional begitu besar di tengah banyaknya media massa cetak dan elektronik. Hal ini bisa terjadi karena kurikulum yang ada masih banyak pada aspek teori, sementara bobot prakteknya masih kurang. Idealnya, dalam bidang kewartawanan dituntut banyak praktek agar bisa muncul jurnalis-jurnalis yang handal.

Untuk menguatkan praktek kewartawanan bagi mahasiswa KPI perlu ada kerja sama yang luas antara jurusan KPI dengan berbagai lembaga pers, baik surat kabar, majalah, radio dan televisi. Lewat kerjasama tersebut berarti membuka kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan ilmu kewartawanan yang mereka peroleh di bangku kuliah. Media massa yang menjadi mitra kerja jurusan KPI bisa menjadi laboratorium kewartawanan bagi mahasiswa. Civitas akademika KPI bisa magang kewartawanan di lembaga tersebut, sehingga ketika mereka lulus dari jurusan KPI,

diharapkan sudah memiliki wawasan dan keterampilan yang luas dalam bidang kewartawanan. Ini menjadi modal penting bagi alumni KPI dalam persaingan yang sangat ketat dalam mendapatkan lapangan kerja.

Dengan demikian profesi kewartawanan inilah sesungguhnya bidang yang lebih tepat dikembangkan di jurusan KPI. Karena seiring dengan perkembangan informasi, lapangan kerja dalam bidang kewartawanan cukup besar dan memberi prospek yang cukup cerah. Menjadi wartawan bagi alumni KPI tidak hanya sebatas menulis berita, namun juga berdakwah lewat tulisan dengan menjaga nilai-nilai etika dan kejujuran.

Pengembangan jurusan KPI ke depan dengan fokus dalam bidang kewartawanan, selain dengan magang wartawan bagi mahasiswa, juga perlu menghadirkan dosen dari kalangan wartawan pada mata kuliah yang terkait dengan pers. Kehadiran mereka bisa sebagai dosen tamu atau bisa juga bertanggung jawab penuh dengan mata kuliah tersebut.

Mahasiswa jurusan KPI juga perlu terus dimotivasi agar mereka memiliki ketertarikan dengan profesi kewartawanan. Dosen misalnya bisa memberi penghargaan bagi mahasiswa yang mempunyai karya dalam bidang pers. Penghargaan itu bisa berupa nilai yang lebih baik bagi mereka yang memiliki karya, atau juga penghargaan dalam bentuk lain. Sebab semakin banyak mahasiswa yang memiliki

karya jurnalistik, seperti menulis di media massa, dengan sendiri mereka telah ikut andil mengharumkan nama kampus di tengah masyarakat.

#### D. Kesimpulan

Akhirnya, bicara tentang profesi wartawan adalah profesi yang relevan bagi civitas KPI. Dalam mewujudkan profesi kewartawan tersebut dibutuhkan dosen-dosen yang profesional dalam bidang media dan kewartawan, baik secara kelimuan maupun praktisi. Untuk itu sangat urgen menyiapkan dosen-dosen KPI studi lanjut dalam bidang media. Selain itu jurusan KPI juga perlu menjalin kerjasama dengan lembaga pers (surat kabar, najalah, radio dan televisi), agar mahasiswa memiliki tempat magang kewartawan.

Kehadiran civitas KPI dalam bidang kewartawan akan menjadi warna tersendiri yang diharapkan mampu membawa nilai-nilai moral di dalamnya. Ketika pers dewasa ini terpuruk dengan krisis moral yang memprihatinkan, diharapkan ke depan bisa kembali memiliki nilai moral yang lebih kuat dengan kehadiran wartawan dari perguruan Tinggi Islam. Semoga civitas KPI bisa berkompetisi dalam bidang kewartawan di tengah banyaknya media yang membutuhkan wartawan profesional, jujur dan memiliki etos kerja yang tinggi. Idealisme tersebut bisa terwujud manakala dosen-dosen yang ada di

jurusan KPI banyak yang ahli dalam bidang media dan kewartawan (\*\*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ashadi Siregar, *Media Massa dan Masyarakat*, LP3Y, Yogyakarta, 1998
- Edward Depari, *Public Relations*, Gramedia, Jakarta, 1998
- Gunawan Mohammad, *Seandainya Saya Wartawan*, Yayasan Alumni Tempo, Jakarta, 1996
- Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1981.
- Jacob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1984
- JVS Tondowijojo, *Media Massa dan Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta, 1991
- Mochtar Lubis, *Pers dan Wartawan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Susan M Strohm, *The Black Press and Black Community: The Los Angeles Sentinel's Coverage of the Watts Riots, 1999*.
- Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.